

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Gambaran Umum Tentang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten/kota di provinsi Riau dengan batas administrative sebagai berikut:

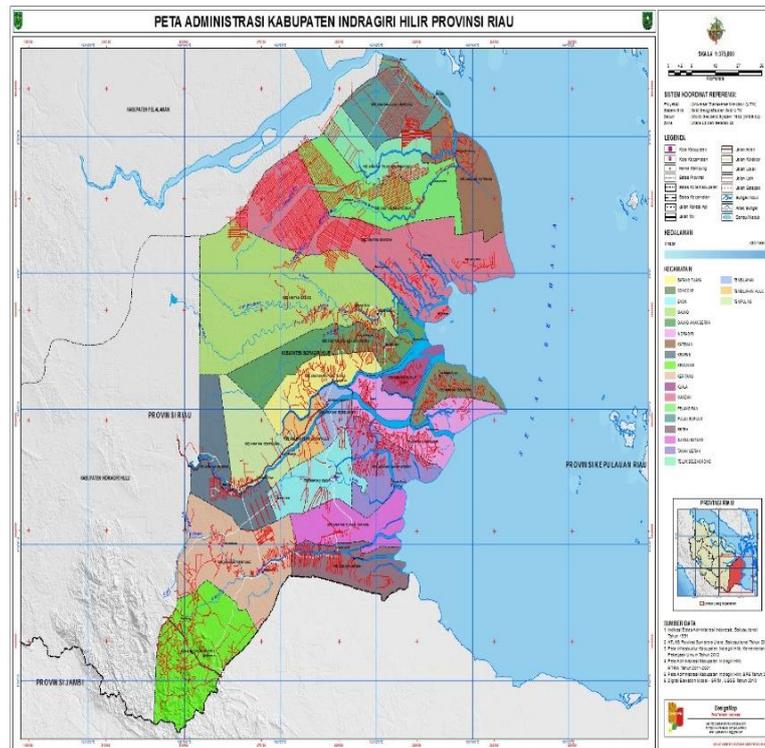
- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak antara $0^{\circ} 36'$ – $1^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ} 30'$ – $104^{\circ} 10'$ Bujur Timur. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian utara dan daerah perbukitan terletak pada bagian barat, serta dataran rendah di sebelah timur.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 1.082.953.06 ha (11,606 km²), terdiri dari 20 kecamatan 198 desa, 38 kelurahan. Kabupaten Indragiri merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak paling barat. Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada posisi 0⁰ 36' – 1⁰ 07' Lintang Selatan dan antara 102⁰ 30' – 104⁰ 10' Bujur Timur.

Akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 wilayah Kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Keritang (543,45 km²), Kemuning (525,48 km²), Reteh (407,75 km²), Sungai Batang (145,99 km²), Enok (880,86 km²), Tanah Merah (721,56 km²), Kuala Indragiri(511,63 km²) , Concong (160,29 km²), Tembilahan (197,37 km²), Tembilahan Hulu (180,62 km²), Tempuling (691,19 km²), Kempas (364,49 km²), Batang Tuaka (1,050,25 km²), Gaung Anak Serka (612,75 km²), Gaung (1,021,74 km²), Mandah (1,479,24 km²), Kateman (561,09 km²), Pelangiran (531,22 km²), Telok Belengkong (499 km²), Pulau Burung (520 km²).

Gambar 4.1
Peta Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir



(sumber: petatematikindo.wordpress.com)¹

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 – 3 meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di

¹ Dikutip dari petatematikindo “Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir”
<https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/01/administrasi-kabupaten-indragiri-hilir/> diakses tanggal 20 maret 2019 jam 23.36

dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografinya, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh kemiringan 0 – 2 %, seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 – 8 %.

2. Pembagian Wilayah Kecamatan

Secara administratif Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan yang terbagi menjadi 198 desa yang mendiami wilayah seluas 58.627,512 ha. Berikut dibawah ini adalah tabel luas wilayah dan jumlah desa per-kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Keritang	20	543.45	4.68
2	Kemuning	12	525.48	4.53
3	Reteh	14	407.75	3.51
4	Sungai Batang	8	145.99	1.26
5	Enok	14	880.86	7.56
6	Tanah Merah	10	721.56	6.22
7	Kuala Indragiri	8	511.63	4.41
8	Concong	6	160.29	1.38
9	Tembilahan	6	197.37	1.7
10	Tembilahan Hulu	4	180.62	1.56
11	Tempuling	7	691.19	5.96
12	Kempas	8	364.49	3.14
13	Batang Tuaka	11	1,050.25	9.05
14	Gaung Anak Serka	8	612.75	5.28
15	Gaung	11	1,021.74	8.8
16	Mandah	12	1,479.24	12.75
17	Kateman	8	561.09	4.83
18	Pelangiran	14	531.22	4.58
19	Teluk Belengkong	13	499	4.3
20	Pulau Burung	14	520	4.48
	Jumlah	201	11 605,97	100.00

(Sumber: Kabupaten Indragiri hilir Dalam Angka 2017)²

² Dikutip dari portal resmi pemerintah INHIL “sistem informasi geografis sarana & prasarana”
<https://www.inhilkab.go.id/> diakses tanggal 20 maret 2019 jam 23.59

3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data statistik yang ada, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 adalah sebanyak 689.938 jiwa (Kabupaten Inhil Dalam Angka 2013). Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari 170.762 Kepala Keluarga (Rumah Tangga). Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong amat rendah, yaitu 84,80 jiwa per Km² dan rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 jiwa.

Pada umumnya distribusi penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir cukup merata untuk setiap wilayah kecamatan. Distribusi penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Gaung Anak Serak, dengan distribusi penduduk sekitar 10,50 jiwa per Km² atau 71.193 jiwa. Selain itu, untuk memudahkan pergerakan, maka penduduk juga memilih untuk membangun rumah yang berada di sekitar tepi jalan dan tepi sungai/parit.

4. Visi dan Misi

Visi kabupaten yaitu "INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025". Misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap

memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

- b. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis : adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

- d. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- e. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

5. Kondisi Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan. Pada Tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 Desa. Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Bupati dan seorang Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya ada 3 (tiga) organisasi perangkat staf pemerintahan daerah, yaitu Sekretariat Daerah (Setda), Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengawas.

Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) asisten, yaitu Asisten Praja (I), Asisten Ekonomi dan Pembangunan (II), dan Asisten Administrasi (III). Masing- masing asisten juga membawahi beberap bagian dan seterusnya sesuai dengan Struktur dan Organisasi Tata Kerja (SOT). Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2010 berjumlah 662.305 jiwa, rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan, yaitu 62.524 jiwa, dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang, yaitu 11.826 jiwa.

Dilihat dari komposisinya, bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 340.299 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 322.006 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 57 jiwa per Km², kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan

Tembilahan dengan tingkat kepadatan 352 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan tingkat kepadatan 25 jiwa per Km².

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan Susunan Perangkat Daerah (SPD) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Daerah
	1. Dinas Pendidikan
	2. Dinas Kesehatan
	3. Dinas Sosial
	4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	6. Dinas Pekerjaan Umum
	7. Dinas Pertambangan dan Energi
	8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	10. Dinas Pendapatan
	11. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

	12. Dinas Perkebunan
	13. Dinas Kehutanan
	14. Dinas Kelautan dan Perikanan
	15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	16. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
5	Badan Daerah
	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	3. Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah
	4. Badan Kepegawaian Daerah
	5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
6	Kecamatan, terdiri dari 20 kecamatan

(Sumber: Website Resmi Kabupaten Indragiri Hilir)³

6. Deskripsi Umum Desa Seberang Sanglar

a. Kondisi Geografis

Desa seberang sanglar merupakan salah satu desa di kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir, yang terletak disebelah utara sungai gansal, LS. 00.40.46.53” dan LT. 163.03.17.41” dengan batas-batas desa sebagai berikut:⁴

a. Sebelah Utara : Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok

b. Sebelah Selatan : Desa Sanglar Kecamatan Reteh

³ Dikutip dari portal resmi pemerintah INHIL “sistem informasi geografis sarana & prasarana” <https://www.inhilkab.go.id/> diakses tanggal 20 maret 2019 jam 00.45

⁴ Perofil desa seberang sanglar

c. Sebelah Barat : Desa Pebenaan Kecamatan Keritang

d. Sebelah Timur : Desa Mekar Sari Kecamatan Reteh

Luas wilayah desa seberang sanglar seluas ± 5.600 Ha (56,0 km²),

terdiri dari :

- 1) Sawah : 962,0 ha
- 2) Perkebunan Perusahaan : 1.780,0 ha
- 3) Perkebunan Rakyat : 2.606,0 ha
- 4) Lainnya :
 - 1) Perumahan : 112,0 ha
 - 2) Jalan : 31,2 ha
 - 3) Sungai/parit/kanal : 72,4 ha
 - 4) Perkantoran : 2,1 ha
 - 5) Sekolah : 11,4 ha
 - 6) Pemakaman Umum : 12,0 ha
 - 7) Lapangan olahraga : 3,1 ha
 - 8) Masjid/surau/langgar : 7,8

b. Pembagian Wilayah Pedukuhan

Jenis iklim yang ada di Desa Seberang Sanglar adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius sampai dengan 39 derajat celcius.

Adapun Desa Seberang Sanglar secara administratif terdiri dari 8 dusun, 17 RW dan 27 RT, sebagai berikut :

- 1) Dusun Dahlia : 2 RW dengan 2 RT
- 2) Dusun Kamboja : 1 RW dengan 3 RT
- 3) Dusun Mawar : 3 RW dengan 5 RT
- 4) Dusun Kelapa : 2 RW dengan 5 RT
- 5) Dusun Seroja : 2 RW dengan 2 RT
- 6) Dusun Anggrek : 3 RW dengan 3 RT
- 7) Dusun Teratai : 2 RW dengan 4 RT
- 8) Dusun Rumbia : 2 RW dengan 3 RT

c. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Seberang Sanglar pada tahun 2015 sebanyak 4.128 jiwa, terdiri dari 2.056 jiwa laki-laki dan 2.072 jiwa perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 1.056 kk. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 3,12% dalam tiga tahun terakhir ini. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Seberang Sanglar rata-rata sebesar 83 jiwa per km². Adapun penyebaran penduduk per RW dari tahun 2010 s/d 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Perkembangan jumlah penduduk Desa Seberang Sanglar

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
2010	3.488	523
2011	3.512	612
2012	3.745	795
2013	3.872	893
2014	4.001	978
2015	4.128	1.056

(Sumber:Perofil Desa Seberang Sanglar Tahun 2015)

d. Keadaan Ekonomi

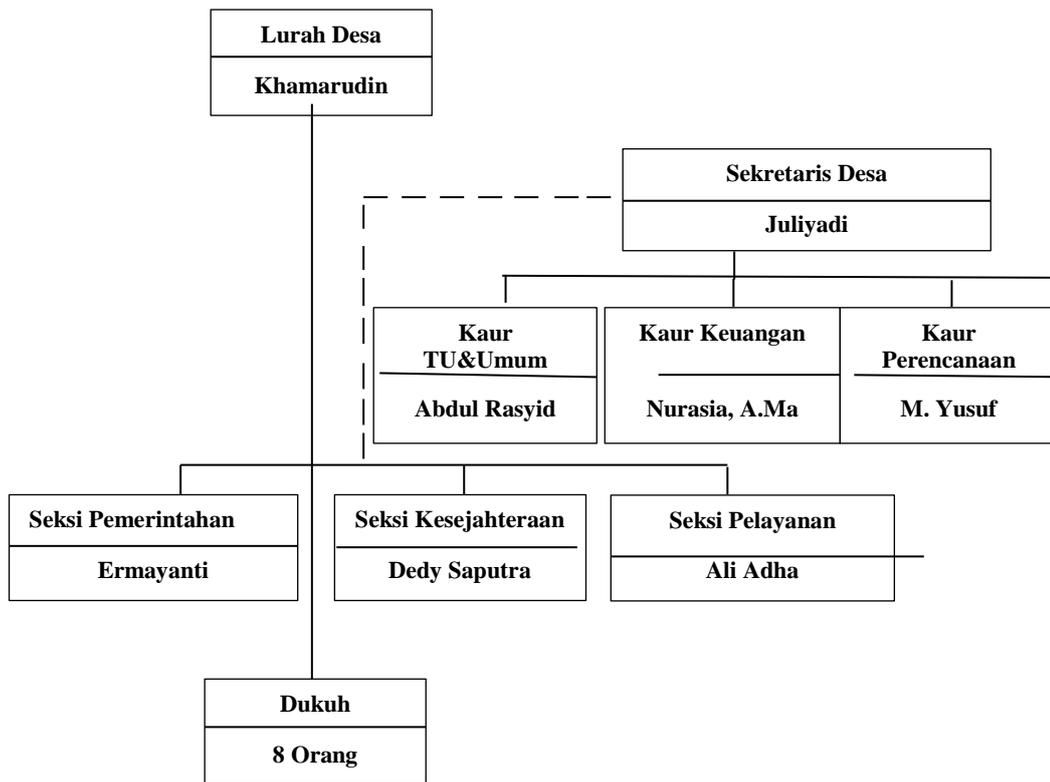
Desa Seberang Sanglar adalah desa pertanian, karena umumnya masyarakat sebagai petani/pekebun dan buruh tani, sementara sebagian kecil adalah wiraswasta, pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan, dan PNS. Desa Seberang Sanglar mempunyai beberapa potensi unggulan yang dapat dikembangkan sebagai berikut :

- 1) Usaha pertanian berupa padi, jagung, kedelai, sayuran, dan semangka.
- 2) Usaha perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang dan arang tempurung.
- 3) Usaha kilang padi berupa beras dan dedak pakan ternak.
- 4) Usaha pertukangan berupa mebel dan pembangunan rumah.
- 5) Usah perbengkelan berupa perbaikan sepeda motor, las, power thereseer, sepeda dan terali besi.
- 6) Usaha perdagangan berupa kios, toko kelontong dan warung.

e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Seberang Sanglar



7. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan desa. Melalui Undang-undang tersebut dan turunannya merupakan angin segar bagi Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan social baik dibidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Forum tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Musrenbangdes merupakan kegiatan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa yang diadakan setiap tahun yang melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat misalnya kelompok pemuda, perempuan, petani dan kelompok masyarakat lainnya.

Musrenbangdes merupakan salah satu cerminan terbesar dari Negara demokrasi seperti Indonesia dimana hak keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat diutamakan guna menampung aspirasi

masyarakat dan dijadikan sebagai landasan dalam program pembangunan di tingkat “*grassroots*.” Oleh karena itu, peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk desa akan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana program kerja yang sudah disusun dengan melibatkan masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa program pembangunan desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam pengembangan ekonomi keluarga, usaha kecil dan menengah, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas dan kelompok lainnya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di kantor Desa Seberang Sanglar dalam wawancara dengan pemerintah Desa Seberang Sanglar dalam hal ini diwakili M. Yusuf⁶ selaku Kaur Perencanaan Desa Seberang Sanglar bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar di beberapa tahapan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Dalam tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan APBDes dimana Pemerintah Desa akan menggali informasi dari masyarakat untuk mendapat informasi mengenai apa saja yang masyarakat butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa Seberang Sanglar. Berdasarkan hasil wawancara

⁵ <https://alpha-i.or.id/2017/03/07/peran-masyarakat-dalam-pengelolaan-anggaran-desa/>, diakses pada 03 mei 2019, pukul 11:16

⁶ M. Yusuf selaku Kaur Perencanaan Desa Seberang Sanglar.

dengan Kepala Desa dan juga sekretaris desa tahap perencanaan ini meliputi:

- 1) Dimulai dengan masyarakat di Desa Seberang Sanglar awalnya mengadakan rapat kecil dalam lingkup RT dipimpin oleh ketua RT. Dalam rapat RT ini masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasinya mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut. Usulan di dalam rapat RT dibawa ke tingkat RW.
- 2) Selanjutnya rapat ditingkatkan RW. Dalam rapat ditingkat RW ini membahas usulan-usulan dari tiap-tiap rapat RT yang berada di bawah pemeritahan RW tersebut agar diketahui bersama kemudian dipilih usulan yang dirasa sangat penting dan mendesak untuk diusulkan dalam penyusunan APBDes. Fungsi dari rapat RW yaitu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rapat RT.
- 3) Tahapan yang selanjutnya yaitu Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk masing-masing ketua dusun, ketua RW dan ketua RT untuk menanyakan hal-hal terkait dengan usulan-usulan yang disampaikan masyarakat untuk kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes di Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Desa, tokoh

masyarakat, kelompok masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ketua Dusun, ketua RW, dan ketua RT memilih dan menyetujui usulan-usulan dari masyarakat tersebut untuk kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes . Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa, dimana dalam acara ini Kepala Desa mengundang berbagai tokoh masyarakat dan narasumber yaitu Bapak camat dan juga dari Kasi Tata pemerintahan untuk membahas mengenai apa saja yang akan disetujui bersama untuk kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes. Musrenbangdes di desa Seberang Sanglar dilaksanakan di balai desa Seberang Sanglar dihadiri oleh:

a) Tingkat Kecamatan:

- (1) Camat Reteh,
- (2) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Reteh,
- (3) PMD kecamatan Reteh.

b) Tingkat Desa:

- (1) Kepala Desa,
- (2) LPMD,
- (3) BPD,
- (4) Kepala Dusun,
- (5) Ketua RW,
- (6) Ketua RT
- (7) Ketua TP PKK,

- (8) Ketua Karang Taruna,
- (9) Tokoh Masyarakat Kelompok Tani,
- (10) Posyandu,
- (11) Kepala Sekolah,
- (12) DLL

Tujuan diadakannya musrenbangdes dengan melibatkan masyarakat melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk menentukan prioritas-prioritas dari berbagai usulan yang disampaikan masing-masing RT karena tidak semua usulan dijadikan skala prioritas. Hal ini karena terbatasnya dana desa sehingga Pemerintah Desa harus memilih mana yang harus didahulukan dengan sistem musyawarah mufakat agar tidak ada kecemburuan dari masing-masing masyarakat desa yang mempertahankan usulan dari masing-masing daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat penting agar terselenggaranya sistem pemerintahan desa yang demokratis. Konsep demokratisasi yang dimaksudkan disini adalah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung, masyarakat harus ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan APBDes. Contoh partisipasi masyarakat secara langsung ditunjukkan dengan memberikan usulan-usulan untuk penyusunan APBDes. Agar dalam penyusunan APBDes isinya sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat selain dibutuhkan dalam tahap perencanaan, juga diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya merupakan hal yang dianggap penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya maka dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Seberang Sanglar menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan misalnya mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dalam tahap ini LPM sebagai perwakilan dari masyarakat berperan mengawasi proses kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, selain LPM banyak juga masyarakat yang mengawasi langsung proses kegiatan pembangunan tersebut.

Pengawasan ini juga memerlukan partisipasi dari masyarakat. Dimana masyarakat harus jeli terhadap kinerja Pemerintah Desa. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan dana APBDes dan program-program yang akan dilaksanakan Partisipasi masyarakat dalam hal ini diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.

B. Faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir setelah berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut pernyataan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuliskan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian masyarakat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di desa Seberang Sanglar nampaknya masih menemukan beberapa kendala.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syahril⁷ selaku Sekertaris Desa Seberang Sanglar beliau mengungkapkan bahwa memang untuk kegiatan rapat yang diadakan di tiap RT hanya dihadiri oleh sebagian masyarakatnya saja karena masih banyak masyarakat di Desa Seberang Sanglar yang apatis atau tidak mau ambil pusing akan hal ini. sebagian besar masyarakat mermehkan kegiatan rapat RT tersebut. Padahal distulah keterlibatan masyarakat secara langsung.

Tujuan dari diadakannya rapat rutin dari tingkat RT yaitu sebagai wadah untuk bertukar pemikiran antar masyarakat mengenai apa saja yang

⁷ Bapak Syahril⁷ selaku Sekertaris Desa Seberang Sanglar

sedang mereka alami atau yang sedang dibutuhkan didaerah sekitar mereka terutama pada program pembangunan dan diharapkan masyarakat lebih peduli mengenai keadaan sekitarnya. Masyarakat dapat mengusulkan program-program kegiatan yang sekiranya memang dibutuhkan melalui rapat RT yang nantinya usulan-usulan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Desa melalui ketua RT sebagai bahan pertimbangan.

Namun masyarakat di Desa Seberang Sanglar sebagian besar lebih mempercayakan semua pengambilan keputusan oleh ketua RT padahal dengan adanya rapat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat desa agar menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Masyarakat yang acuh tak acuh pada sistem pemerintahan desa mengakibatkan Pemerintah Desa juga mengalami kendala untuk penyusunan APBDes hal ini karena kurangnya informasi dari masyarakatnya mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa kebingungan dalam memilih kegiatan apa saja yang harus didahulukan.

Rendahnya kehadiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah awal disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau kepedulian dari masing masing masyarakat terhadap desa tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat juga disampaikan bahwa masyarakat tidak bisa hadir dalam musyawarah hal ini disebabkan oleh kesibukan dari masing-masing masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Harbi Sani⁸ yang menyatakan “saya tidak hadir dalam kegiatan musyawarah di Rumh pak RT

⁸ Harbi Sani, Masyarakat Desa Seberang Sanglar

karena kendala waktu. Saat musyawarah tidak bertepatan dengan pekerjaan saya. jadi saya tidak bisa hadir. Selain itu juga saya pasti setuju saja dengan apapun hasil yang disampaikan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya keinginan masyarakat untuk hadir dalam musyawarah namun juga disebabkan oleh kurangnya keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide dalam bentuk masukan dan saran, Jadi musyawarah yang dilangsungkan terkesan pasif.

Rendahnya keaktifan masyarakat saat musyawarah menyebabkan tidak tertampungnya keinginan seluruh masyarakat di desa tersebut melainkan hanya sebagian saja. Sehingga BPD kesulitan dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat di Desa Pitra. Selain itu masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah desa serta kurangnya potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan pula pada rendahnya kinerja BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat di dalam proses pembangunan desa. Dari hal tersebut di atas maka dapat digambarkan bahwa seharusnya antara masyarakat dan BPD harus menjalin kerjasama yang berkesinambungan agar proses pembangunan di desa tersebut bisa berjalan dengan maksimal dan tidak menemui banyak kendala.

Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi penting untuk diperhatikan. Masyarakat yang mengetahui dan memahami pentingnya partisipasi dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat desa biasanya akan lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Salah satunya dalam pembangunan di desa, apabila masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan, diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting, baik dari tahap perencanaan, pengelolaan sampai pengawasan.

2. Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan masyarakat desa juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa. Mayoritas masyarakat Desa Seberang Sanglar bekerja sebagai Pekebun dan petani hal tersebut dapat juga menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat, karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat Desa Seberang Sanglar menyatakan bahwa masyarakat Desa Seberang Sanglar setiap harinya sudah disibukkan oleh pekerjaan dari pagi hingga sore hari, bahkan tidak jarang diantara mereka yang bekerja hingga malam hari jika memang pekerjaannya belum terselesaikan. Maka waktu mereka untuk memedulikan urusan lain di luar pekerjaan sehari-

hari mereka sangat minim sehingga mereka memilih untuk lebih mengesampingkan hal tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk berpartisipasi yang dapat memberikan keuntungan terhadap kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan bekerja untuk kepentingan bersama.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat karena kemampuan masing-masing masyarakat untuk memahami akan pentingnya partisipasi berbeda-beda. Masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi setidaknya sedikit lebih mengerti akan pentingnya partisipasi masyarakat desa, setidaknya lebih peduli terhadap sistem pemerintahan desa dan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan di desa Seberang Sanglar menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SD dan SLTA saja.

4. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program desa kepada masyarakat berdampak pada kurangnya masyarakat yang mengetahui mengenai program desa yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Karena adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan desa. Terutama dalam penyusunan APBDes yang membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Karna dijelaskan didalam pasal 68 ayat (1), masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa